

KEUANGAN DESA CERDAS: PEMANFAATAN UANG DIGITAL DAN PENGELOLAAN ARUS KAS PADA BUMDES KADUAGUNG BARAT, RANGKASBITUNG

Anisa^{1*}, Zulfa Rosharlanti², Khanif Faozi³

1,2, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen02385@unpam.ac.id

ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Kaduagung Barat, Rangkasbitung melalui pemanfaatan uang digital dan pengelolaan arus kas. Permasalahan yang dihadapi BUMDes meliputi rendahnya literasi keuangan digital, minimnya penggunaan uang elektronik, dan pencatatan keuangan yang masih manual. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan literasi keuangan digital, pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan arus kas dengan menggunakan TAKABUMDes, serta edukasi kepada masyarakat tentang transaksi non-tunai. Hasil yang dicapai meliputi adanya peningkatan pemahaman pengelola terhadap teknologi keuangan, peningkatan transaksi digital di desa, dan pengelolaan arus kas. Hal ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan yang baik antara pengurus BUMDes dan para pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan menjadi model replikasi pengelolaan keuangan desa yang lebih modern, transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Desa Cerdas, Uang Digital, Arus Kas, BUMDes, Literasi Keuangan

ABSTRACT

This Community Service Program aims to improve the efficiency and transparency of financial management of BUMDes Kaduagung Barat, Rangkasbitung through the use of digital money and cash flow management. The problems faced by BUMDes include low digital financial literacy, the lack of use of electronic money, and manual financial recording. The activities carried out include digital financial literacy training, assistance in the use of cash flow recording applications using TAKABUMDes, and education to the public about non-cash transactions. The results achieved include an increase in managers' understanding of financial technology, an increase in digital transactions in the village, and cash flow management. This can be achieved with good support between BUMDes management and stakeholders. In the long term, this activity is expected to be a more modern, transparent and accountable model for replicating village financial management.

Keywords: Smart Village, Digital Money, Cash Flow, BUMDes, Financial Literacy

PENDAHULUAN

Dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Fatoni, 2023). Pemerintah Desa Kaduagung Barat pada tahun 2016 membentuk sebuah BUMDes yang diberi nama Bebedahan Berkah dan bergerak di bidang usaha budidaya jamur. Usaha budidaya jamur tidak berlangsung lama karena pemahaman pengelola keuangan dan pemasaran yang belum dilakukan secara masif. Pada tahun 2019, BUMDes beralih bidang usaha menjadi penyewaan ruko yang dibangun menggunakan dana desa. Sepanjang perjalanan usahanya BUMDes sendiri hanya memiliki legalitas berupa AD ART dan pelaporan keuangan berupa buku kas. BUMDes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Keberadaan BUMDes memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi tantangan serius dalam tata kelola keuangan, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan digital, ketergantungan pada pencatatan manual, dan minimnya pemanfaatan teknologi finansial. Masalah ini bukan hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Desa Kaduagung Barat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi melalui BUMDes namun menghadapi tantangan serupa. Kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan minimnya pemahaman pengelola terhadap konsep uang digital dan arus kas menjadi hambatan utama. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini membuka peluang besar untuk membenahi sistem keuangan desa secara menyeluruh.

Melalui program “Keuangan Desa Cerdas”, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memperkenalkan dan menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi digital serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Pendekatan yang digunakan menekankan pada edukasi praktis dan pendampingan intensif, guna memastikan bahwa perubahan yang terjadi bukan bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan.

Secara teoritis, pendekatan ini didasarkan pada Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Menurut TAM, penerimaan pengguna terhadap teknologi ditentukan oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks BUMDes, semakin besar persepsi manfaat penggunaan aplikasi keuangan digital dan semakin mudah penggunaannya, maka semakin besar pula kemungkinan teknologi tersebut diadopsi secara luas. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat, tetapi juga

pada upaya meningkatkan persepsi positif melalui pelatihan dan simulasi langsung terlait pengelolaan arus kas. Dana yang diterima BUMDes berasal dari Pendapatan sewa ruko yang menjadi usaha utamanya. Perlu adanya pemahaman pengurus BUMDes, mengingat sebagian besar sewa yang diterima bersifat pembayaran dimuka untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Bagaimana mengelola dana ini agar penggunaannya tepat sasaran untuk keberlanjutan usaha BUMDes. Selain itu setiap tahun BUMDes melakukan bagi hasil usaha BUMDes, diutamakan untuk dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), Pemberi Modal dan Pengelola Usaha dari BUMDes, jasa produksi dan kegiatan lainnya sesuai kinerja pengelola BUMDes. Besarnya bagi hasil BUMDes ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Tata cara pembagian hasil di tetapkan paling lambat 30 hari setelah tutup buku. Dengan adanya pengelolaan arus kas yang baik, tentu akan membantu mempersiapkan data dan informasi yang akan digunakan pada saat bagi hasil. Program ini diharapkan dapat menjadi model tata kelola keuangan desa modern yang bisa direplikasi di wilayah lain.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini mengacu pada pendekatan **partisipatif dan edukatif**, dengan melibatkan langsung para pengurus dan staf BUMDes sebagai mitra utama. Kegiatan dilakukan secara bertahap agar pemahaman dan keterampilan yang ditransfer dapat terinternalisasi dan berkelanjutan. Lima tahapan utama dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Observasi dan Identifikasi Kebutuhan

Sebagai langkah awal, tim dosen melakukan kunjungan langsung ke lokasi BUMDes Kaduagung Barat untuk melakukan observasi lapangan dan diskusi awal dengan para pengurus. Fokus observasi diarahkan pada sistem pengelolaan arus kas yang berjalan saat ini serta pemahaman mereka terhadap penggunaan uang digital. Tahap ini bertujuan untuk menggali kebutuhan aktual dan spesifik yang dihadapi BUMDes dalam aspek pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta integrasi teknologi keuangan digital.



Gambar 1. Observasi dan Identifikasi Kebutuhan

Penyusunan Modul Pelatihan

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim menyusun modul pelatihan yang relevan, mencakup: (a) dasar-dasar manajemen arus kas, (b) strategi pencatatan keluar-masuk dana secara rapi dan akuntabel, serta (c) pengenalan dan simulasi penggunaan uang digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking dalam operasional BUMDes. Materi disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan konteks desa.

Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan edukatif dilakukan melalui sesi pelatihan interaktif yang menggabungkan teori dan praktik. Peserta dilibatkan secara aktif dalam studi kasus dan simulasi langsung pencatatan arus kas menggunakan template Excel sederhana, serta praktik penggunaan aplikasi uang digital untuk transaksi usaha BUMDes. Selama proses ini, pendekatan andragogi diterapkan untuk menyesuaikan metode penyampaian dengan karakteristik peserta dewasa.



Gambar 2. Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Arus kas dan Pengenalan Uang Digital

Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelatihan, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan peserta melalui kuesioner dan praktik langsung. Selain itu, tim juga meminta umpan balik terkait kendala dan kebutuhan lanjutan agar dapat menjadi dasar perbaikan dan pendalaman materi pada sesi pendampingan berikutnya.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Tim pengabdian akan melakukan monitoring pasca-pelatihan untuk memastikan implementasi pengelolaan arus kas yang lebih tertib serta penggunaan alat pembayaran digital dalam transaksi harian BUMDes. Jika diperlukan, pendampingan lanjutan akan diberikan secara daring maupun luring.

Dengan metode ini, diharapkan BUMDes dapat membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan modern, serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengevaluasi keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan pengukuran berbasis instrumen kuesioner yang disebarluaskan sebelum dan sesudah pelatihan kepada para pengurus BUMDes. Tabel 1 menyajikan hasil perbandingan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta pada tiga aspek utama yang menjadi fokus kegiatan: pemahaman uang digital, kemampuan mengelola arus kas, dan minat bertransaksi secara non-tunai.

Tabel 1. Hasil Pre dan Post Test Literasi Keuangan Digital

Kategori Penilaian	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman konsep uang digital	35%	80%
Kemampuan mengelola Arus Kas	20%	75%
Minat transaksi non-tunai	30%	80%

Peningkatan Literasi Uang Digital

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman konsep uang digital dari 35% menjadi 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa materi pelatihan yang diberikan, termasuk simulasi penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), dan mobile banking, berhasil meningkatkan literasi digital peserta. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), literasi keuangan digital merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan inklusi keuangan nasional, di mana pemahaman terhadap teknologi keuangan berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang lebih bijak dan efisien. Secara teoritis, peningkatan ini sejalan dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks kegiatan ini, ketika peserta mulai memahami kemudahan dan manfaat dari uang digital dalam operasional BUMDes, maka resistensi terhadap teknologi cenderung menurun, dan adopsi pun meningkat.

Penguatan Kemampuan Pengelolaan Arus Kas

Kemampuan mengelola arus kas meningkat dari 20% menjadi 75% setelah kegiatan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelatihan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan kas harian, dan pengelolaan dana usaha. Arus kas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang paling krusial bagi keberlanjutan BUMDes, karena secara langsung berkaitan dengan likuiditas dan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang (Subramanyam, 2014).

Dalam konteks BUMDes, penguatan aspek ini menjadi penting karena laporan keuangan yang baik mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, pengelola BUMDes diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah desa.

Peningkatan Minat Transaksi Non-Tunai

Minat peserta untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai meningkat dari 30% menjadi 80%. Ini menunjukkan terjadinya perubahan perilaku finansial, dari yang awalnya berbasis tunai menuju sistem digital. Transformasi ini penting mengingat pemerintah melalui Bank Indonesia menargetkan peningkatan digitalisasi sistem pembayaran di desa-desa melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Perubahan minat ini juga dapat dijelaskan melalui *Diffusion of Innovation Theory* dari Rogers (2003), yang menyatakan bahwa adopsi inovasi—dalam hal ini uang digital—terjadi jika individu merasa inovasi tersebut memberikan nilai tambah, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam kegiatan ini, para peserta mengalami secara langsung kemudahan dan kepraktisan transaksi non-tunai, misalnya dalam pembelian barang BUMDes atau pembayaran jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem digital.

Penggunaan aplikasi seperti TAKABUMDes atau BukuKas mulai diterapkan dalam operasional BUMDes. Pencatatan keuangan yang sebelumnya dilakukan manual, kini mulai dilakukan secara digital. Hal ini memudahkan proses pelaporan keuangan BUMDes, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Selain itu, masyarakat yang mengikuti sosialisasi juga mulai menggunakan dompet digital dan QRIS dalam transaksi sehari-hari.

Penerapan ini memperkuat teori TAM yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat akan berdampak pada niat dan perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi. Pelatihan yang diberikan meningkatkan kedua persepsi tersebut sehingga pengelola BUMDes terdorong untuk menggunakan teknologi secara mandiri.

Namun, implementasi program ini juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan perangkat (smartphone atau komputer) dan kendala jaringan internet di beberapa titik desa. Meskipun demikian, semangat peserta dan dukungan dari perangkat desa membuat program tetap berjalan dengan hasil yang positif. Monitoring dua minggu pasca kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes masih rutin menggunakan aplikasi pencatatan digital dan menunjukkan inisiatif dalam memperbarui data keuangan mereka.

KESIMPULAN

Program ini efektif meningkatkan pemahaman dan praktik keuangan digital di tingkat desa. Pengelola BUMDes kini lebih percaya diri menggunakan sistem pencatatan digital dan masyarakat mulai terbiasa dengan transaksi non-tunai. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah desa untuk mendukung infrastruktur dan edukasi lanjutan.

Peningkatan yang signifikan pada tiga kategori utama tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung (experiential learning) dan penyederhanaan materi sesuai konteks lokal mampu mempercepat proses literasi keuangan dan transformasi digital di tingkat desa. Program ini dapat

direplikasi di desa-desa lain yang mengalami permasalahan serupa, dengan menyesuaikan modul dan metode berdasarkan kebutuhan setempat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Pamulang, Pemerintah Desa Kaduagung Barat, serta seluruh masyarakat desa atas partisipasinya dalam pelaksanaan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Everret M. Rogers. (2003). Diffusion of Innovation. 5th edition. New York: Free Press.
- Fatoni, A. (2023). Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Parumasan. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 180–186.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2093>
- Subramanyam, K. R. (2014). Financial Statement Analysis. Eleventh Edition. 2 Penn Plaza, NY: Mc Graw Hill Education.